

## **Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Atas Persepsi Kepala Sekolah, Guru, Dan Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tentang Penerapan Sistem Zonasi**

**Nelli Murodah**

STAI Ki Ageng Pekalongan  
nelimurodah@yahoo.co.id

**Dian Nur Muniroh**

, SMK YMI Wonopringgo  
,dnnurm@gmail.com

**Abstract:** *This research is a qualitative research that aims to analyze the perceptions of school principals, teachers, and students of public junior high schools in Kedungwuni District, Pekalongan Regency regarding the implementation of the zoning system. Data were collected by in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Data analysis used an interactive analysis model proposed by Miles and Huberman. The results show that the perceptions of school principals, teachers, and students of public junior high schools in the Kedungwuni District, Pekalongan Regency, regarding the implementation of the zoning system differ. There are those who see it from a positive perspective, there are also negative ones. There are those who agree with the implementation of this system, some are not. There are those who feel benefited, but there are also views that are disadvantaged. But whatever it is, in a policy it is natural if there are pros and cons. For this reason, it is necessary to have an in-depth understanding and continuous outreach by various parties regarding this policy.*

**Keywords:** *Education Policy, Zoning System, and Schools*

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang penerapan sistem zonasi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang penerapan sistem zonasi berbeda-beda. Ada yang memandang dari segi positif, ada juga yang negatif. Ada yang setuju dengan penerapan sistem ini, ada pula yang tidak. Ada yang merasa diuntungkan, namun ada pula yang

berpandangan dirugikan. Tapi apapun itu, dalam sebuah kebijakan tentu wajar jika terjadi pro dan kontra. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam dan sosialisasi terus menerus yang dilakukan oleh berbagai pihak tentang kebijakan ini.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, dan Sekolah

## PENDAHULUAN

Kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan di Indonesia setiap tahun menuai polemik di tengah masyarakat, terutama menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).<sup>1</sup> Padahal, kebijakan ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan pemerataan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Dikeluarkan pada tahun 2017, dan mulai diterapkan di sekolah-sekolah terutama tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran 2019/2020 di Kabupaten Pekalongan.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya, masih ditemui berbagai kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti baru-baru ini, yakni PPDB tahun 2022 jalur zonasi di SMA Negeri 1 Batang. Di mana ada sembilan calon peserta didik yang mendadak hilang namanya di jurnal PPDB. Padahal, kesembilan peserta tersebut tidak pernah melakukan pembatalan hingga pendaftaran ditutup. Bahkan para calon siswa ini jarak rumahnya rata-rata kurang dari 800 meter dari sekolah, namun mereka digantikan nama-nama calon siswa yang jarak zonasinya justru lebih jauh.<sup>3</sup>

Selain itu, isu yang berkembang di masyarakat adalah orang tua tidak lagi mengakui anaknya pada saat PPDB dengan sistem zonasi ini. Pasalnya, setahun sebelum PPDB dimulai, mereka menitipkan anaknya ke dalam Kartu Keluarga (KK) kerabat bahkan kenalannya yang rumahnya dekat dengan

---

<sup>1</sup>Mahpudin, Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia, “*Jurnal*”, TRANSFORMATIVE, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, h. 149, DOI:10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2, Diunduh 17 Agustus 2022.

<sup>2</sup>Irfan Arifuddin, *dkk*, Sistem Zonasi, Antara Realita dan Harapan, dalam Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISSN 2714-5972, h. 372, Diunduh 17 Agustus 2022.

<sup>3</sup> detikJateng, Rabu (6/7/2022), <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6165377/9-nama-calon-siswa-jalur-zonasi-ppdb-sman-1-batang-mendadak-hilang>.

sekolah yang dituju. Jadi tidak heran, jika banyak tipu-tipu yang dilakukan oleh oknum bahkan orangtua agar anaknya bisa masuk dan diterima di sekolah impian mereka, dan mereka pun rela membayar kerabat ataupun kenalannya tersebut guna mencapai tujuan.

Berangkat dari latar belakang seperti itu, maka peneliti berminat mengkaji fenomena tersebut lebih komprehensif. Kajian tersebut peneliti tuangkan dalam judul penelitian: “Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian atas Persepsi Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi”.

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti telah menganalisis dan meninjau kembali hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di antaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Aris Nurlailiyah, Mallevi Agustin Ningrum, *dkk.*, dan Candra Wijaya, *dkk.* Hal ini peneliti jadikan sebagai acuan untuk membantu dan mempermudah dalam melakukan penelitian yang lebih sistematis dan berbasis teori yang kuat.

Jurnal pertama karya Aris Nurlailiyah yang berjudul “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlailiyah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PPDB zonasi terdapat 2 dampak: 1) Dampak positif, diantaranya lingkungan beragam akan mengstimulasi murid, guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efisien, dan 2) Dampak negative dari berbagai elemen, diantaranya anak tidak dapat masuk ke SMP Negeri meski nilainya bagus, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMP Negeri karena berada pada wilayah blank spot, guru harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negative akan mudah menular ke siswa yang lain. Sehingga dapat menjadi gambaran adanya kebijakan zonasi disamping dampak positif juga memberikan dampak terhadap perilaku siswa di SMPN Yogyakarta yakni kurang disiplin, yang pada akhirnya menimbulkan prestasi akademik rendah.<sup>4</sup>

Jurnal kedua karya Mallevi Agustin Ningrum, *dkk.* dengan judul “Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua

---

<sup>4</sup> Aris Nurlailiyah, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, “*Jurnal*”, Realita Vol. 17, No. 1, Januari 2019, h. 13, ISSN: 1829-9571, e-ISSN: 2502-860X, Diunduh 11 Agustus 2020.

sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan”. Dari penelitian yang dilakukan Ningrum, *dkk.* menunjukkan bahwa perspektif orangtua yang menyekolahkan di SD terkait dengan penerapan zonasi masih belum maksimal dan banyak orangtua yang belum mengetahui secara detail aturan terbaru tentang kebijakan zonasi. Berdasarkan pemahaman orangtua, sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah yang menganjurkan anak bersekolah didasarkan pada jarak domisili yang terdekat dengan sekolah. Penerapan zonasi ini menunjukkan dampak negatif yang dirasakan oleh orangtua karena merasa kecewa dengan sistem zonasi ini sehingga tidak bisa bersekolah yang diinginkan bagi anak mereka. Namun, ada orangtua yang menunjukkan dampak positif dari sistem zonasi ini karena anak yang domisilinya terdekat dengan sekolah lebih diprioritaskan, menghemat biaya transport, dan sekaligus menghapus sekolah favorit. Harapan ke depan dari kepala sekolah, guru, dan orangtua adalah sistem zonasi yang sudah berjalan ini tetap dilanjutkan di jenjang sekolah dasar. Penerapannya harus didukung dengan peningkatan perluasan wilayah zonasi, kualitas pendidik, kualitas mutu layanan sekolah, serta sarana prasarana, agar terwujud sekolah yang lebih maju.<sup>5</sup>

Jurnal ketiga karya Candra Wijaya, *dkk.* yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, *dkk.* menghasilkan bahwa 1) Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Langkat. Sejauh ini implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Langkat telah berjalan dengan efektif karena telah nampak potensi-potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Langkat, dan 2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kekurangpahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda.

---

<sup>5</sup>Mallevi Agustin Ningrum, *dkk.*, Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan, “*Jurnal*”, JCP: Jurnal Cakrawala Pendas, Vol. 8, No. 3, Juli 2022, h. 932, p-ISSN: 2442-7470, e-ISSN: 2579-4442, DOI: <http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2661>, Diunduh 11 Agustus 2020.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya.<sup>6</sup>

Persamaan antara hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti dan mengkaji tentang sistem zonasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, sumber data utama yang peneliti gunakan, waktu pelaksanaan penelitian, tempat penelitian, serta fokus kajian yang peneliti fokuskan pada persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian atas Persepsi Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi” belum pernah ada sebelumnya, dan di sinilah pentingnya penelitian ini untuk mengisi kekosongan informasi dan pengetahuan mengenai hal itu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang penerapan sistem zonasi. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dan peneliti langsung terjun ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah para informan yang terlibat dalam penerapan sistem zonasi di SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yaitu kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni, 3 guru SMP Negeri 1 Kedungwuni, 3 siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni, kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni, 3 guru SMP Negeri 2 Kedungwuni, 3 siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni, kepala SMP Negeri 3 Kedungwuni, 3 guru SMP Negeri 3 Kedungwuni, dan 3 siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni. Sedangkan Sumber data sekundernya adalah karyawan, dokumen-dokumen sekolah di lokasi penelitian, serta buku-buku dan sumber lain yang *relevan*. Kemudian untuk mengumpulkan data, peneliti

---

<sup>6</sup> Candra Wijaya, *dkk.*, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat, “*Jurnal*”, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (1), 30 April 2020, h. 162, ISSN 2085-482X (Print), ISSN 2407-7429 (Online), DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>, Diunduh 11 Agustus 2020.

menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam uji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>7</sup> Sedangkan triangulasi dengan metode berarti melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran, dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda.<sup>8</sup> Adapun analisis data peneliti lakukan pada saat pengumpulan data bertangsiung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>9</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Kepala SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi

Seperti diketahui bahwa sistem zonasi adalah sebuah sistem yang dilaksanakan dengan harapan untuk mempercepat pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, berkeadilan, serta sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan. Sistem ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah negeri, seperti di SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada tahun ajaran 2019/2020. Dalam penerapannya masih terjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama di lembaga pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni didapat bahwa: “Zonasi adalah sebuah sistem yang

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), h. 330.

<sup>8</sup>Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 88.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 334-335.

diberlakukan pada pendidikan kita sekarang ini, sehingga dalam pelayanan PPDB misalnya, sekolah harus mengikuti aturan yang berlaku. Tak terkecuali zonasi itu sendiri. Ya, memang dalam penerapannya menuai pro dan kontra, namun hal itu masih bisa kita atasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada calon peserta didik baru”.<sup>10</sup> Dari sini dapat dilihat bahwa kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni dalam menerapkan sistem zonasi berpatokan pada peraturan yang berlaku saat ini. Adapun pro dan kontra yang muncul terkait penerapan sistem tersebut, sekolah sudah mengantisipasinya dengan cara memberikan sosialisasi kepada calon peserta didik sebelum pelaksanaan PPDB dimulai.

Lebih lanjut, untuk persepsi kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni tentang penerapan sistem zonasi adalah “Zonasi yang diterapkan saat ini, dapat dikatakan sebagai suatu proses uji coba. Pasalnya, baru kali ini dan di tahun ini pula diberlakukan. Jika pendaftaran berbasis media online, sudah tidak asing lagi bagi kami. Namun terkait dengan zonasi, ya kalau menurut saya sistem ini mungkin kedepannya akan memiliki banyak peluang yang bagus untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Artinya, sistem ini baik untuk dilanjutkan pelaksanaannya. Akan tetapi, sebenarnya ada banyak catatan khusus terhadap kebijakan sistem ini sehingga perlu dikaji lagi”.<sup>11</sup> Jadi, pada dasarnya kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni mendukung adanya kebijakan terhadap penerapan sistem zonasi. Dengan alasan bahwa sistem ini dinilai sangat berpotensi untuk pemerataan pendidikan. Akan tetapi, ada catatan khusus yakni masih adanya kekurangan dalam penerapan kebijakan ini, sehingga menurutnya perlu dikaji kembali.

Wawancara berlanjut pada kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni, hasilnya adalah “Zonasi itu kebijakan dari pusat, yang sudah melewati berbagai pemikiran dan pertimbangan, dan tahun ini secara serentak diterapkan disemua sekolah-sekolah negeri, sehingga ya mau tidak mau sebagai sekolah negeri kita ikut menerapkannya”.<sup>12</sup> Dari penuturannya tersebut, dapat kita pahami bahwa kebijakan dari sistem zonasi ini merupakan kebijakan yang bersal dari pusat dan semua sekolah negeri wajib

---

<sup>10</sup> Usman, Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>11</sup> Usman, Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>12</sup> Saefudin, Kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

melaksanakannya. Hasil dari penerapan zonasi nantinya menjadi bahan kajian ulang bagi pemerintah untuk dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan sistemnya untuk diterapkan kembali pada tahun yang akan datang. Adapun persepsi yang muncul dari kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni terkait penerapan sistem zonasi adalah “Dalam hal penerapan mungkin masih ada pro dan kontra, karena masih baru. Akan tetapi, jika ini sudah berjalan, sudah dievaluasi, dan diperbaiki, serta mengkaitkan berbagai instrumen yang ada, maka bisa jadi zonasi adalah jalan keluar bagi dunia pendidikan agar tidak terjadi lagi kesenjangan”.<sup>13</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan sistem zonasi yang sekarang diberlakukan ini masih menjadi perbincangan yang actual bagi dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah negeri. Penerapan sistem zonasi ini pun tidak secara langsung diterapkan, namun juga ada pertimbangan dari pemerintah melihat masih adanya kesenjangan di lingkungan sekolah.

Adapun ketika wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Kedungwuni, hasilnya adalah “Yang dimaksud dengan zonasi itu yang berdasarkan zona atau wilayah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa zonasi dalam sistem PPDB yaitu penerimaan siswa sesuai dengan domisilinya. Jadi, penerimaan siswa berdasarkan jarak antara rumah siswa tersebut dengan sekolah, bukan lagi berpatokan pada prestasi”.<sup>14</sup> Jadi, menurutnya bahwa sistem ini adalah sebuah sistem yang mengkoordinasi seluruh sekolah negeri untuk menerima siswa berdasarkan pada ukuran jarak antara rumah siswa dengan sekolah, dan bukan lagi berpatokan pada nilai yang dimiliki siswa. Walaupun ada yang berdasar pada prestasi namun prosentasenya hanya sedikit.

Sementara itu, persepsi yang muncul dari kepala SMP Negeri 3 Kedungwuni tentang penerapan sistem zonasi, bahwa “Zonasi adalah bagian dari kebijakan, dan kami di sekolah sudah semestinya menjadi penyelenggara kebijakan. Apapun yang sudah menjadi sebuah kebijakan, apalagi yang mengatur tentang pendidikan ya bagaimanapun kita akan tetap laksanakan. Kedepannya, jika berbagai aspirasi dan kontra yang terjadi bisa diselesaikan dan dicari solusinya, maka bisa jadi zonasi ini bisa menjadi alat yang efektif

---

<sup>13</sup> Saefudin, Kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

<sup>14</sup> Daryono, Kepala SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

untuk pemerataan pendidikan”.<sup>15</sup> Jadi, dalam pandangannya bahwa meskipun zonasi adalah kebijakan yang saat ini menuai pro dan kontra, setelah dievaluasi dan dicari akar pokok masalahnya serta disosialisasikan secara terus menerus, maka bisa jadi sistem ini akan berjalan dengan baik pada tahun-tahun berikutnya.

Dari berbagai persepsi kepala SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi adalah bentuk dari perwujudan rasa tanggungjawab terhadap kebijakan yang sedang digalakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan pendidikan. Kedepan, zonasi bisa jadi salah satu alternative terbaik untuk mengatasi masalah kesenjangan dalam dunia pendidikan, asal pemerintah dan perumus kebijakan mau belajar dan mengambil pengalaman dari dampak penerapan sistem zonasi sekarang ini. Setidaknya ada kajian evaluasi, perbaikan, serta pengembangan, agar zonasi yang saat ini sedang berjalan tidak menjadi suatu permasalahan yang kritis dan berlarut-larut.

## 2. Persepsi Guru SMP Negeri Se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi

Dalam penerapan sistem zonasi ini, peneliti juga mewawancarai guru SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara pertama dengan Numri yakni guru SMP Negeri 1 Kedungwuni. Hasilnya bahwa “Sistem ini sebenarnya bagus, karena memberi kesempatan kepada siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah untuk bisa masuk dan diterima di sekolah negeri. Hal ini, tentu akan berimplikasi pada pengurangan kemacetan lalu lintas. Jika jaraknya dekat, maka siswa tidak perlu naik motor atau angkutan umum”.<sup>16</sup>

Hampir senada dengan Numri, Suparmi menuturkan bahwa “Dengan sistem zonasi ini, sekolah-sekolah akan menjadi sama rata, tidak ada lagi sekolah favorit. Selain itu, beban guru dalam mengajar pun nantinya juga akan sama, karena siswa yang didapat bukan dari kalangan siswa-siswa yang

---

<sup>15</sup>Daryono, Kepala SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

<sup>16</sup>Moh. Zamroni Numri, Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

pintar saja”.<sup>17</sup> Sementara itu, Rofiq mengatakan hal yang berbeda. Menurutnya bahwa ia “Lebih setuju pada sistem yang dulu dibandingkan zonasi, karena zonasi ini dirasa belum siap. Kita bisa lihat dari berita atau informasi bahwa persyaratan pemerataan di daerah tertentu ada yang belum terpenuhi, tetapi sistem sudah berjalan. Jadi baiknya lakukan evaluasi, setidaknya evaluasi terkait kebijakan sistem ini dan beri keleluasaan kepada daerah untuk bisa menyesuaikan kondisinya”.<sup>18</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Rofiq. Hisyam, guru SMP Negeri 2 Kedungwuni, menyatakan bahwa “Terkait zonasi bisa dibilang kurang setuju, karena dalam hal PPDB saja yang terjadi adalah perselisihan. Terutama terkait dengan kuotanya. Kenapa yang berprestasi hanya sedikit yang diterima. Sedangkan kesempatan terbanyak justru berdasarkan jarak. Ini bisa menjadi pematah semangat bagi anak. Sudah giat-giatnya belajar, nilai bagus, tapi mau masuk ke sekolah pilihannya saja ternyata susah karena jarak rumahnya jauh dari sekolah”.<sup>19</sup>

Lain halnya dengan Styarini. Ia melontarkan pernyataan yang berbeda. Ia “Setuju dengan sistem baru ini, karena sekolah yang baik juga harus bisa mendidik anak yang kurang pintar”.<sup>20</sup> Pernyataan Styarini didukung oleh Rochmalia. Menurutnya bahwa “Sistem ini sudah baik, karena kita melihat bukan dari persoalan jarak saja ya, tapi kita melihat lebih pada pemerataan kualitas pendidikan yang mana hal ini menjadi tujuan utamanya. Jadi yang namanya persaingan tidak dapat dielakkan dalam sistem zonasi”.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, wawancara dengan guru SMP Negeri 3 Kedungwuni yakni dengan Rokhilah. Dari hasil wawancara dengan Rokhilah didapat bahwa “Sistem ini, sebelum berlanjut lebih jauh harusnya ada kajian lagi. Karena masih banyak penyimpangan yang terjadi, misalnya kita lihat dalam

---

<sup>17</sup>Sri Suparmi, Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>18</sup>Nur Rofiq, Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>19</sup>Moh. Hisyam, Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

<sup>20</sup>Setyarini, Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

<sup>21</sup>Emi Rochmalia, Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

berita, ada orang tua mencari cara lain agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dengan membuat SKTM. Sehingga, perlu adanya evaluasi kembali terkait kebijakan ini”.<sup>22</sup>

Senada dengan Rokhilah, Kasnadi mengatakan bahwa “Mungkin karena terlalu cepat dalam penerapannya, dan kurangnya proses sosialisasi, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Apalagi sekarang ini, rata-rata semua berita lewat situs internet, kalau jarang akses ya akan tertinggal. Jadi, menurut saya sih lebih baik jangan diterapkan dulu”.<sup>23</sup> Namun menurut Rekhan bahwa “Zonasi ini kan tujuannya baik untuk pemerataan, dan baik juga jika diterapkan di berbagai jenjang sekolah yang ada. Namun sebenarnya perlu evaluasi dan pertimbangan lagi. Jika ke depan penerapannya bisa lebih baik lagi, maka zonasi bisa jadi alternatif terbaik dalam pemerataan”.<sup>24</sup>

Dari berbagai persepsi yang muncul, masih ada sebagian yang menolak adanya sistem zonasi. Dilihat dari berbagai segi, bisa jadi dengan diterapkannya sistem ini sangat menguntungkan, seperti mengurangi kemacetan, beban guru mengajar menjadi sama rata karena sekolah tidak hanya menerima siswa yang berprestasi saja, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antara sekolah favorit dengan yang tidak. Namun, disisi lain masih ada yang keberatan dengan diterapkannya sistem ini. Dengan alasan, sistem ini belum bisa memberikan keadilan bagi siswa yang berprestasi namun terkendala dengan jarak yang jauh dari sekolah yang diinginkan. Selain itu masih adanya penyimpangan, di mana prosentase penerimaan siswa dengan sistem zonasi yakni untuk siswa berprestasi lebih sedikit dibanding siswa yang kurang mampu. Akibatnya, banyak orang tua yang membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk anaknya. Tujuannya tidak lain agar anaknya bisa diterima dan masuk di sekolah yang diinginkan.

### 3. Persepsi Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang Penerapan Sistem Zonasi

---

<sup>22</sup> Rokhilah, Guru SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

<sup>23</sup> Kasnadi, Guru SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

<sup>24</sup> Rekhan, Guru SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

Untuk penerapan sisten zonasi ini, selain mewawancara kepala sekolah dan guru, peneliti juga mewawancara siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dari hasil wawancara dengan siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni, yang pertama dengan Kadafi. Kadafi menuturkan bahwa “Saya merasa diuntungkan, karena tadinya pesimis dengan nilai sedikit yang saya miliki. Dengan sistem zonasi inilah, saya diterima di SMP ini. Harapannya sih, kedepan sistem ini akan terus berjalan”.<sup>25</sup>

Sedikit berbeda dari Kadafi. Kamila menyatakan bahwa “Dengan sistem ini sih ada rasa senang tapi ada juga tidaknya. Senangnya karena dengan sistem ini, saya merasa tertolong oleh jarak rumah ke sekolah yang membuat saya diterima di sekolah ini. Tetapi tidak senangnya, PR saya jadi semakin banyak, karena saya merasa kurang mampu untuk mengejar prestasi teman yang lain yang benar-benar masuk ke sekolah ini karena prestasi”.<sup>26</sup> Adapun menurut Zuhri bahwa “Menyikapi zonasi itu ya menurut pandangan masing-masing. Yang punya prestrasi bagus, namun rumahnya jauh pasti menganggap tidak adil, dirugikan, dan tidak akan setuju dengan kebijakan sistem ini. Namun sebaliknya, yang merasa diuntungkan akan mendukung sistem ini tetap berjalan”.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, wawancara dengan Fitriyani yakni siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni. Hasilnya bahwa “Saya kurang setuju, karena zonasi itu diterima karena dekat dengan sekolah. Ini akan memunculkan pemikiran buat apa belajar dan berprestrasi kalau yang diutamakan bukan nilai, mendingan pindah rumah saja yang dekat dengan sekolah negeri”.<sup>28</sup> Sementara itu, Khumaero berpandangan bahwa “Sepertinya zonasi itu menyelaraskan dengan kurikulum yang ada. Penilaian untuk mata pelajaran sekarang kan bukan tentang angka saja, tetapi tentang sikap. Begitu juga dengan zonasi, masuk sekolah bukan karena nilai saja, tetapi karena dekat dari rumah. Jadi

---

<sup>25</sup> M. Muamar Kadafi, Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>26</sup>Nadya Kamila, Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>27</sup> M. Ribkhi Zuhri, Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 12 Januari 2020.

<sup>28</sup>Nur Fitriyani, Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

ya, saya setuju-setuju saja”.<sup>29</sup> Adapun Irawan merasa bahwa “Saya termasuk diuntungkan dengan adanya sistem ini. Tapi melihat teman saya yang tidak beruntung, saya merasa kasihan juga. Mungkin sistemnya diperbaiki lagi, biar tidak ada yang merasa dirugikan”.<sup>30</sup>

Lutfiyah, siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni menyatakan bahwa “Saya setuju zonasi, tapi saya juga setuju dengan sistem nilai. Karena di situ kan pasti ada persaingan. Kalau dulu harus bersaing nilai misalnya, sekarang bersaing dengan batasan jarak”.<sup>31</sup> Berbeda dari Lutfiyah. Novia menyatakan bahwa “Saya kurang setuju dengan sistem zonasi. Karena zonasi itu hanya menguntungkan yang terdekat, yang jauh jadinya selalu was-was. Apalagi sudah jauh, tidak ada sekolah yang negeri, akhirnya ke swasta yang biayanya mahal”.<sup>32</sup> Lain halnya dengan Naqshabandi. Menurutnya bahwa “Dengan zonasi, selain merata juga lingkungan sekolah berkurang kebisingannya karena siswa di sini rata-rata berasal dari daerah dekat sini, sehingga tidak perlu bawa motor dan naik angkutan umum”.<sup>33</sup>

Dari berbagai persepsi yang muncul dikalangan siswa, ada yang merasa diuntungkan, ada pula yang berpandangan bahwa dengan sistem ini temannya merasa dirugikan. Tentu, dari sini dapat kita pahami bahwa zonasi masih menjadi dilema untuk kelanjutannya. Jika sistem ini dihapus, yang terjadi adalah pemerintah harus berpikir ulang, membuat kebijakan baru, dan memulainya dari nol. Namun jika diteruskan, maka pemerintah dan pembuat kebijakan harus terus mengevaluasi kebijakan yang ada saat ini, memperbaiki kekurang-kekurangan, serta kelemahan-kelemahannya. Sehingga sistem yang ada dan berlaku saat ini, akan menjadi semakin baik untuk kedepannya.

## **PENUTUP**

---

<sup>29</sup> Intan Khumaero, Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

<sup>30</sup> Ade Irawan, Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 25 Januari 2020.

<sup>31</sup> Lutfiyah, Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

<sup>32</sup> Novia, Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

<sup>33</sup> Naqshabandi, Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Wawancara, 8 Februari 2020.

Dari berbagai macam persepsi kepala sekolah, guru, dan juga siswa SMP Negeri se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang penerapan sistem zonasi tentu berbeda-beda. Ada yang memandang dari segi positif, ada juga yang negatif. Ada yang setuju dengan penerapan sistem ini, ada pula yang tidak. Ada yang merasa diuntungkan, namun adapula yang berpandangan dirugikan. Tapi apapun itu, dalam sebuah kebijakan, tentu wajar jika terjadi pro dan kontra. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam dan sosialisasi yang dilakukan terus menerus oleh berbagai pihak. Disamping pemerintah, perumus kebijakan juga harus mengevaluasi setiap kebijakan baru, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, serta mau mengembangkannya lagi menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Jika hal itu dapat dilakukan, maka bisa jadi zonasi adalah salah satu alternative terbaik untuk mengatasi masalah kesenjangan dalam dunia pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, Irfan. dkk. Diunduh 17 Agustus 2022. Sistem Zonasi, Antara Realita dan Harapan. Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (PPDN) 2019. Universitas Muhammadiyah Surakarta. ISSN 2714-5972.
- detikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6165377/9-nama-calonsiswa-jalur-zonasi-ppdb-sman-1-batang-mendadak-hilang>. Rabu (6/7/2022).
- Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Mahpudin. Diunduh 17 Agustus 2022. Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. “*Jurnal*”. TRANSFORMATIVE. Vol. 6. No. 2. Tahun 2020. DOI:10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ningrum, Mallevi Agustin. dkk. Diunduh 11 Agustus 2020. Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. “*Jurnal*”. JCP: Jurnal Cakrawala Pendas. Vol. 8. No. 3. Juli 2022. p-ISSN: 2442-7470. e-ISSN: 2579-4442. DOI: <http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2661>.

Nurlailiyah, Aris. Diunduh 11 Agustus 2020. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. “*Jurnal*”. Realita Vol. 17. No. 1. Januari 2019. ISSN: 1829-9571. e-ISSN: 2502-860X.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya, Candra. dkk. Diunduh 11 Agustus 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. “*Jurnal*”. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. 12 (1). 30 April 2020. ISSN 2085-482X (Print). ISSN 2407-7429 (Online). DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>.

### **Wawancara:**

Daryono. 8 Februari 2020. Kepala SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Fitriyani, Nur. 25 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Hisyam, Moh. 25 Januari 2020. Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara, Pribadi. Pekalongan.

Irawan, Ade. 25 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Kadafi, M. Muamar. 12 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Kamila, Nadya. 12 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Kasnadi. 8 Februari 2020. Guru SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Khumaero, Intan. 25 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

Lutfiyah. 8 Februari 2020. Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.

- Naqshabandi. 8 Februari 2020. Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Novia. 8 Februari 2020. Siswa SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Numri, Moh. Zamroni Numri. 12 Januari 2020. Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Rekhan. 8 Februari 2020. Guru SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Rochmalia, Emi. 25 Januari 2020. Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Rofiq, Nur. 12 Januari 2020. Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Rokhilah. 8 Februari 2020. Guru SMP Negeri 3 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Saefudin. 25 Januari 2020. Kepala SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Setyarini. 25 Januari 2020. Guru SMP Negeri 2 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Suparmi, Sri. 12 Januari 2020. Guru SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Usman. 12 Januari 2020. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.
- Zuhri, M. Ribkhi. 12 Januari 2020. Siswa SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan.